

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS PEREMPUAN MANDIRI
BERBUDAYA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

Oleh

**M. SUFRIZAL AMRI HARAHAHAP
NPM. 241801048**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS PEREMPUAN MANDIRI
BERBUDAYA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Administrasi Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area**



**M. SUFRIZAL AMRI HARAHAHAP
NPM. 241801048**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya Pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara**

N a m a : M. Sufrizal Amri Harahap

N P M : 241801048

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II



Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Adam, S.E. M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 14 April 2026

Nama : M. Sufrizal Amri Harahap

NPM : 241801048



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Adam, MAP
Sekretaris	: Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP
Pembimbing I	: Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Pembimbing II	: Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP
Penguji Tamu	: Prof. Dr. Badaruddin, M.Si

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis dengan judul ***Implementasi Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara*** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik di suatu Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Medan, April 2026



M. Sufrizal Amri Harahap

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Sufrizal Amri Harahap
NPM : 241801048
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

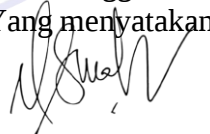
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



M. Sufrizal Amri Harahap

ABSTRAK

Nama : M. Sufrizal Amri Harahap
NPM : 241801048
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Pembimbing II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Sumatera Utara, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan terdiri dari aparatur DP3AKB dan peserta program. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KELAPA MUDA secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Program ini mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian ekonomi, serta kesadaran perempuan terhadap peran sosial dan budaya. Kejelasan tujuan program dan komitmen pelaksana menjadi faktor utama pendukung keberhasilan implementasi. Selain itu, dukungan masyarakat dan kolaborasi antar lembaga turut memperkuat pelaksanaan program. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, koordinasi dan komunikasi yang belum optimal, perbedaan kapasitas kelembagaan antar daerah, serta pengaruh budaya patriarkal di beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pendekatan berbasis budaya lokal agar implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Perempuan, KELAPA MUDA, DP3AKB, Sumatera Utara

ABSTRACT

Name : M. Sufrizal Amri Harahap
NPM : 241801048
Study Program : Master of Public Administration
Supervisor I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Supervisor II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

This study aims to analyze the implementation of the Women's Cultural-Based Empowerment Class Program (KELAPA MUDA) at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning (DP3AKB) of North Sumatra Province, and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, involving DP3AKB officials and program participants as informants. Data analysis was conducted using the policy implementation model of Van Meter and Van Horn, which consists of six main variables. The results show that the implementation of the KELAPA MUDA program has generally been carried out quite well, although it is not yet optimal. The program has succeeded in improving women's capacity, economic independence, and awareness of their social and cultural roles. Clear program objectives and strong commitment from implementers are the main supporting factors. In addition, community support and inter-agency collaboration also strengthen the program implementation. However, several obstacles remain, including limited human resources and budget, suboptimal coordination and communication, disparities in institutional capacity across regions, and the influence of patriarchal culture in some areas. Therefore, strengthening human resources, improving cross-sector coordination, and adopting a local culture-based approach are necessary to enhance the effectiveness and sustainability of the program implementation.

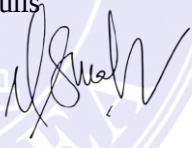
Keywords: Policy Implementation, Women Empowerment, KELAPA MUDA, DP3AKB, North Sumatra

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Implementasi Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari teknik penulisan maupun kedalaman materinya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu upaya dalam penyempurnaan tesis ini.

Medan, April 2026
Penulis


M. Sufrizal Amri Harahap

DAFTAR ISI

Halaman	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Implementasi	9
2.2 Pengertian Program atau Kebijakan	15
2.3 Pengertian Gender	16
2.4 Pemberdayaan Perempuan.....	17
2.5 Penulisan Terdahulu	19
2.6 Kerangka Berpikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	26
3.3 Informan Penelitian	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Teknik Analisis Data	30
3.6 Definisi Konsep dan Operasional	32
3.6.1 Definisi Konsep	32
3.6.2 Definisi Operasional	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara	35
4.1.1. Gambaran Umum.....	35
4.1.2. Visi dan Misi.....	36
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan,	

Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	
Provinsi Sumatera Utara	37
4.1.4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,	
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	
Provinsi Sumatera Utara	40
4.2. Pembahasan	41
4.2.1. Hasil Wawancara Penelitian	41
4.2.2. Analisis Implementasi Program Kelas Perempuan Mandiri	
Berbudaya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,	
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	
Provinsi Sumatera Utara	58
4.2.3. Faktor Pendukung Implementasi Program Kelas Perempuan	
Mandiri Berbudaya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,	
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi	
Sumatera Utara	64
4.2.4. Faktor Penghambat Implementasi Program Kelas Perempuan	
Mandiri Berbudaya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,	
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi	
Sumatera Utara	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 21 Oktober 2015, negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencanangkan 17 tujuan global dengan 169 sasaran yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan dimasa depan, yang kemudian menjadi kesepakatan global yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau istilah resmi yang digunakan Pemerintah Indonesia ialah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Kesetaraan Gender merupakan salah satu tujuan dari TPB yang termaktub dalam tujuan kelima tentang mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, memiliki 5 target, yaitu : (1) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi; (2) Menghapuskan segala bentuk kekerasan; (3) Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan; (4) Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan; (5) Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial dan ekonomi.

Masyarakat yang berdaya terutama perempuan berdaya adalah kunci keberhasilan pembangunan sebuah negara, terutama dalam mencapai keadilan bagi semua, kesejahteraan yang merata, kesetaraan gender, perdamaian dan rasa aman bagi semua lapisan. Perempuan yang berdaya akan menjadi aktor penting dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa terkecuali. Laki-laki dan perempuan

memiliki kontribusi pada pencapaian indikator kualitas hidup manusia.

Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 memiliki IPG sebesar 90,67 poin, capaian ini berada di bawah capaian Nasional pada tahun yang sama yaitu 91,06 poin dan masih tergolong rendah. Pada tahun 2020, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Utara sebesar 67.52 , sangat jauh dari capaian Nasional sebesar 75.57. Masih kuatnya nilai-nilai patriarki di sebagian masyarakat menyebabkan posisi perempuan seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan maupun akses terhadap sumber daya ekonomi. Akibatnya, perempuan rentan berada pada posisi subordinat dan sulit mandiri, baik secara sosial maupun ekonomi (Siregar, 2021).

Oleh karena itu, perlu ada upaya peningkatan kemampuan perempuan, salah satunya dengan memberikan pendidikan melalui Sekolah Perempuan, dengan tujuan utamanya adalah mengembangkan (menumbuhkan dan memperkuat) kepemimpinan perempuan agar memiliki kesadaran kritis, kepedulian, solidaritas, dan kecakapan hidup, sehingga lebih berdaya dalam menyelesaikan persoalan dirinya, keluarganya dan mampu berkontribusi melakukan perubahan sosial di lingkungannya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai suatu unit kerja di Pemerintah Provinsi Sumatera, dalam hal ini memegang peranan sebagai fungsi yang melaksanakan upaya-upaya pemerintah untuk mendorong pemberdayaan kaum perempuan menuju terwujudnya kesetaraan gender. Salah satu program yang sudah dilaksanakan ialah melalui Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya atau yang lebih populer disingkat KELAPA MUDA, yang merupakan program inovasi yang dilaksanakan melalui kolaborasi

lintas sektor baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

Konsep Sekolah Perempuan yakni sebagai Model Pemberdayaan Perempuan untuk kesetaraan Gender dibidang Sosial, Ekonomi, dan Politik. Dalam bidang ekonomi, adapun pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan yakni dalam hal kewirausahaan, keterampilan, permodalan, pasar, dan sebagainya. Dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan yakni dalam hal penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perkawinan anak dan pekerja anak. Sedangkan dalam bidang politik, pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan yakni berupa kepemimpinan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan sebagainya. Maka sehubungan dengan hal tersebut guna mendukung Pencapaian SDGs.

Mewujudkan Persamaan Kesetaraan Gender di tingkat propinsi sampai desa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas P3AKB Provinsi Sumatera menginisiasi program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) Sumatera Utara. Program ini merupakan salah satu bentuk inovasi dalam rangka meningkatkan kapasitas perempuan agar mampu mandiri, berdaya, dan tetap menjaga nilai-nilai budaya lokal. Melalui program ini, perempuan diberikan pembekalan berupa keterampilan ekonomi produktif, pemahaman mengenai kesetaraan gender, serta penguatan karakter berbasis budaya. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi perempuan, tetapi juga melestarikan kearifan lokal sebagai identitas masyarakat Sumatera Utara.

Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya berfokus pada peningkatan keterampilan, pemahaman kesetaraan gender, penguatan ekonomi produktif, serta

penanaman nilai-nilai budaya yang membentuk karakter perempuan tangguh. Program ini juga diharapkan mampu menjadi ruang belajar bersama bagi perempuan agar lebih percaya diri, memiliki daya tawar, serta dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya penguatan budaya lokal agar tetap relevan dalam dinamika modernisasi.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan, di mana keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaannya. Van Meter dan Van Horn (1975) dalam model *A Theoretical Framework for the Study of Implementation* menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan (*policy standards and objectives*), (2) sumber daya (*resources*), (3) karakteristik organisasi pelaksana (*characteristics of the implementing agencies*), (4) sikap atau kecenderungan pelaksana (*disposition of implementers*), (5) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan (*inter-organizational communication and enforcement activities*), serta (6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik (*economic, social, and political conditions*). Interaksi yang harmonis antar variabel tersebut menentukan sejauh mana implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penelitian ini, Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023–2024, merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan

perempuan berbasis potensi budaya lokal. Program ini berfokus pada pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas ekonomi perempuan, serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah. Prestasi yang diraih, yakni Juara II Lomba Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, menunjukkan bahwa program ini telah mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi atas nilai inovatif dan relevansinya terhadap isu pemberdayaan perempuan.

Meskipun demikian, realitas implementasi di lapangan menunjukkan bahwa capaian program belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil pra-survei dan laporan kegiatan DP3AKB tahun 2023, ditemukan bahwa pelaksanaan program di beberapa kabupaten/kota menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, koordinasi lintas sektor yang belum efektif, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Kondisi ini mencerminkan lemahnya variabel *resources* dan *inter-organizational communication* sebagaimana dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn.

Keterbatasan sumber daya menyebabkan aparat pelaksana kesulitan dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran di 33 kabupaten/kota Sumatera Utara. Di sisi lain, komunikasi dan koordinasi antar pihak pelaksana, baik antar level pemerintahan maupun dengan lembaga mitra seperti kelompok perempuan, belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada perbedaan persepsi terhadap tujuan program dan menghambat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi perempuan di beberapa daerah mencerminkan persoalan pada variabel *disposition of implementers* dan *characteristics of the implementing agencies*. Komitmen dan pemahaman pelaksana dalam menyosialisasikan manfaat program masih beragam, bergantung pada

kapasitas dan karakteristik organisasi pelaksana di masing-masing wilayah. Akibatnya, persepsi masyarakat terhadap manfaat program belum seragam, dan keberlanjutan program sering kali bergantung pada inisiatif individu aparaturnya atau tokoh lokal.

Lebih jauh, faktor ekonomi, sosial, and politik turut memengaruhi keberhasilan implementasi. Sumatera Utara memiliki karakteristik sosial budaya yang sangat beragam, mulai dari daerah urban seperti Medan yang memiliki tingkat literasi tinggi, hingga wilayah rural seperti Nias dan Mandailing Natal yang masih kental dengan budaya tradisional dan struktur sosial patriarkal. Perbedaan kondisi ini berimplikasi pada tingkat penerimaan dan adaptasi kebijakan di masing-masing daerah.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, seperti Siregar (2021) tentang implementasi program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Deli Serdang dan Simanjuntak (2022) yang menyoroti hambatan komunikasi lintas lembaga dalam kebijakan perlindungan anak, terlihat adanya *research gap* dalam kajian implementasi program pemberdayaan berbasis budaya. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara dimensi budaya lokal dan efektivitas kebijakan pemberdayaan perempuan dari perspektif model Van Meter dan Van Horn.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai implementasi Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) pada tahun 2023–2024 berdasarkan kerangka teori Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program, menilai efektivitas variabel implementasi,

serta memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan kinerja kebijakan pemberdayaan perempuan di Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penulisan ini, sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara saat ini?
- 2) Apa faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini dilaksanakan dengan tujuan:

- 1) Untuk menganalisis implementasi Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara

1.4 Manfaat Penulisan

Sasaran dan manfaat dari pelaksanaan penulisan adalah :

- 1) Kegunaan Teoritis

Bahan untuk menganalisis implementasi Program Kelas Perempuan

Mandiri Berbudaya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara.

2) Kegunaan Praktis

Bahan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara untuk peningkatan program inovasi pelayanan publik.

3) Kegunaan Akademik

Menjadi masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dalam bidang Administrasi Publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Kata implementasi merupakan serapan dari bahasa Inggris “*to implement*”, artinya mengimplementasikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan, dimana hal ini berkaitan dengan perencanaan kesepakatan maupun penerapan kewajiban. Sehingga implementasi dapat dipandang bukan hanya sekedar aktivitas, namun secara lebih luas implementasi merujuk pada suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan mengacu pada norma dan aturan tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman (2002) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Wahab (1991: 117) dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Birkkan, 2001: 177; Heineman et al., 1997: 60; Ripley dan Franklin, 1986; Wibawa dkk., 1994: 15). Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III

(1984: 1) bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

Gaffar (2009) menyatakan bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik, dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi merupakan rangkaian aktifitas untuk menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan Wahab (2016) menyatakan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat atau kelompok pemerintahan dan swasta yang diarahkan pada tujuan yang telah digariskan.

Guntur setiawan (2004) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya para ahli yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi.

Menurut Purwanto dan Sulistyastusi, implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Menurut beberapa pengertian implementasi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa, implementasi adalah suatu proses atau mekanisme yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan

sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Salusu (2021) menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu keputusan. Keputusan yang dimaksud adalah tercapainya tujuan atau sasaran kebijakan. Pencapaian prestasi tersebut membutuhkan kinerja yang sempurna. Dari sini dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah operasi atau fase penting dari berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Implementasi kebijakan adalah proses dimana kebijakan yang telah dirumuskan diubah menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Implementasi kebijakan publik dipandang sebagai proses kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor. George C. Edwards III (1980) mengidentifikasi empat dimensi utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap/motivasi pelaksana), dan struktur birokrasi. Komunikasi kebijakan mencakup saluran dan kejelasan penyampaian arahan kebijakan kepada pelaksana. Sumber daya meliputi dukungan anggaran, peralatan, dan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Disposisi atau sikap pelaksana berkaitan dengan motivasi, kompetensi, dan komitmen aparat dalam menerapkan kebijakan. Struktur birokrasi menitikberatkan pada aturan internal organisasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan fragmentasi tugas yang dapat mempercepat atau menghambat pelaksanaan. Edward berargumen bahwa kombinasi keempat aspek ini saling berkaitan dan bersama-sama menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Merilee S. Grindle (1980) menawarkan perspektif berbeda dengan menekankan dua variabel besar: isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan meliputi: tujuan dan sasaran yang jelas, kelompok sasaran yang akan menerima manfaat, jenis manfaat yang dijanjikan, serta detail program dan sumber daya yang dialokasikan. Sementara itu, variabel lingkungan mencakup kekuatan kepentingan para aktor yang terlibat, karakteristik institusi penguasa (lembaga dan rezim yang berkuasa), serta respons dan kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan tersebut. Grindle menekankan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan, yaitu sejauh mana faktor-faktor di atas mendukung tercapainya tujuan.

Menurut model *top-down* dari Mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi sukses implementasi kebijakan publik:

- (a) karakteristik masalah (*tractability*), seperti tingkat kesulitan teknis isu dan cakupan perubahan yang diharapkan;
- (b) karakteristik kebijakan – misalnya kejelasan isi kebijakan, dukungan teori, alokasi sumber daya, serta konsistensi aturan dan komitmen aparat; dan
- (c) variabel lingkungan non-hukum – meliputi kondisi sosial-ekonomi, kemajuan teknologi, dukungan publik, dan sikap kelompok pemilih.

Mereka mendefinisikan implementasi sebagai “pemahaman yang sebenarnya setelah suatu program dinyatakan berlaku, yang mencakup upaya administratif dan penciptaan dampak nyata pada program itu sendiri”. Model ini mempertegas perlunya evaluasi terus-menerus terhadap implementasi dan standar pencapaian tujuan.

Secara konseptual, implementasi kebijakan menurut Edwards III (Mulyadi, 2015:47) adalah “*aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat*”. Nugroho (2014) menyebutnya sebagai “*cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya*”, sementara Mulyadi (2015) memandang implementasi sebagai proses transformasi multi-organisasi yang mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, implementasi menghubungkan perumusan kebijakan dengan hasil nyata di lapangan. Efektivitas kebijakan didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. William N. Dunn (1998:429) menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan apakah suatu tindakan mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan melibatkan serangkaian aktivitas yang kompleks, termasuk interpretasi kebijakan, alokasi sumber daya, dan koordinasi antarlembaga. Implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada faktor-faktor seperti kapasitas pelaksana, ketersediaan sumber daya, dan lingkungan eksternal.

Terdapat beberapa model implementasi kebijakan yang sering digunakan dalam penulisan administrasi publik, yaitu model *top-down*, *bottom-up*, dan model sintesis. Model *top-down* menekankan pentingnya kejelasan tujuan kebijakan dan kontrol dari pembuat kebijakan di tingkat pusat. Sebaliknya, model *bottom-up* mengakui peran pelaksana di tingkat lokal dalam membentuk implementasi melalui diskresi dan adaptasi. Model sintesis, seperti yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), menggabungkan elemen dari kedua pendekatan dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti standar kebijakan, sumber daya, dan

disposisi pelaksana.

Model ini mengidentifikasi enam variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan harus jelas dan konsisten agar pelaksana dapat memahami apa yang diharapkan.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran, tenaga kerja terlatih, dan infrastruktur teknologi.

3. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Penegakan

Komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat lokal sangat penting untuk memastikan keselarasan dalam implementasi. Aktivitas penegakan, seperti pelatihan dan pengawasan, juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

4. Karakteristik Agensi Pelaksana

Kapasitas organisasi, struktur birokrasi, dan budaya organisasi memengaruhi implementasi. Kapasitas teknis dan komitmen organisasi akan menentukan keberhasilan adopsi sistem ini.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Konteks lokal, seperti tingkat literasi digital, persepsi terhadap korupsi, dan dukungan politik, memengaruhi implementasi.

6. Disposisi Pelaksana

Sikap dan motivasi pelaksana, seperti pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan, sangat memengaruhi keberhasilan implementasi.

2.2 Pengertian Program atau Kebijakan

Secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia program dalam konteks ketatanegaraan diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha. Program pemerintah merupakan suatu bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga merupakan suatu kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut Joan sebagaimana dikutip Tayibnapis (2000:9) program adalah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Dalam hal ini suatu program dapat saja berbentuk nyata (*tangible*) seperti kurikulum, atau yang berbentuk abstrak (*intangible*) seperti prosedur. Sedangkan menurut Feuerstein (1990:209) program adalah sebuah rencana yang diputuskan terlebih dahulu, biasanya dengan sasaran-sasaran, metode, urutan dan konteks tertentu.

Program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Arikunto dan Jabar, 2009:4). Dalam hal ini ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program yaitu:

- a. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan.
- b. Terjadi dalam waktu relatif lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Menurut Suherman dan Sukjaya (1990:24) program adalah suatu rencana

kegiatan yang dirumuskan secara operasional dengan memperhitungkan segala faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian program tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapatlah dimaknai bahwa program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Program dalam hal ini berupa aktivitas atau rangkaian aktivitas yang akan direncanakan

2.3 Pengertian Gender

Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana individu terlahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Sehingga gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks, menjadi peran dan perilaku sosial. Gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula.

Didalam Webster's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Umar, 2010:30). Sejalan dengan itu, menurut Narwoko dan Yuryanto (2004:334) gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki

dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa gender ialah peran yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran dapat dilekatkan kepada laki-laki atau perempuan berdasarkan kebiasaan ataupun budaya dimana peran tersebut hanya dimiliki atau dilakukan oleh laki-laki ataupun oleh perempuan.

2.4 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional maupun global. Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses, mengontrol, dan memanfaatkan sumber daya pembangunan. Menurut Moser (1993), pemberdayaan perempuan mencakup peningkatan akses terhadap sumber daya, penguatan peran dalam pengambilan keputusan, serta kesadaran kritis terhadap kesetaraan gender.

Lebih lanjut, Kartasmita (1996) menegaskan bahwa pemberdayaan tidak sekadar memberikan "bantuan", tetapi lebih pada menciptakan kondisi agar individu atau kelompok memiliki daya untuk berkembang dengan memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Dalam perspektif UN Women (2015), pemberdayaan perempuan diukur

melalui lima aspek:

1. Akses (*Access*): kemampuan perempuan untuk memperoleh sumber daya, pendidikan, informasi, dan kesempatan kerja.
2. Partisipasi (*Participation*): keterlibatan perempuan dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta kegiatan pembangunan.
3. Kontrol (*Control*): kemampuan perempuan untuk mengelola, mengatur, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
4. Kesadaran Kritis (*Conscientization*): pemahaman perempuan terhadap hak-haknya serta kesadaran untuk melawan diskriminasi berbasis gender.
5. Kesejahteraan (*Welfare*): peningkatan taraf hidup perempuan baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis.

Dalam konteks Indonesia, pemberdayaan perempuan juga memiliki landasan hukum dan kebijakan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
3. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia.

Pemberdayaan perempuan tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya, sosial, dan ekonomi. Di satu sisi, budaya lokal dapat menjadi modal sosial yang memperkuat peran perempuan, namun disisi lain budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat seringkali membatasi ruang gerak perempuan. Oleh karena itu,

strategi pemberdayaan perempuan harus memperhatikan aspek kearifan lokal sekaligus berupaya melakukan transformasi budaya agar lebih responsif gender.

2.5 Penulisan Terdahulu

Penelitian mengenai pemberdayaan perempuan berbasis potensi lokal dan budaya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nazirah, Nilahayati, Humaira, Ramadhani, Lubis, dan Wirda (2025), misalnya, meneliti pelatihan kemandirian pangan bagi perempuan di Desa Dayah Aron, Aceh. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal berupa pengolahan jagung teukeurabe menjadi produk kuliner khas yang bernilai ekonomi. Melalui pendekatan partisipatif, perempuan didorong tidak hanya untuk melestarikan tradisi, tetapi juga menjadikannya sebagai peluang usaha. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan, kreativitas, dan antusiasme perempuan dalam mengembangkan produk lokal, bahkan hingga mampu menjangkau pasar daring. Penelitian ini menegaskan bahwa pelatihan berbasis kearifan lokal dapat menjadi sarana efektif bagi pemberdayaan perempuan, baik dari sisi ekonomi maupun pelestarian budaya.

Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Qosidah (2022) di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Penelitian ini menekankan pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan potensi lokal berupa tanaman Parijotho. Tanaman ini diolah menjadi berbagai produk olahan dengan nilai jual tinggi melalui pembentukan kelompok tani perempuan dan pendampingan yang berkesinambungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut mampu meningkatkan keterampilan perempuan, membentuk kelompok usaha bersama, dan berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga. Temuan ini

memperlihatkan bahwa pemberdayaan perempuan berbasis potensi lokal tidak hanya menciptakan kemandirian ekonomi, tetapi juga mendorong partisipasi kolektif dalam pembangunan desa.

Sementara itu, Lutfiyah (2023) meneliti pemberdayaan perempuan berbasis potensi lokal dalam program Desa Vokasi. Fokus penelitian ini adalah bagaimana perempuan dilibatkan dalam kelompok usaha vokasional melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan jejaring usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan vokasional tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas individu dan kelompok, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, menguatkan kemandirian ekonomi keluarga, serta berkontribusi terhadap pembangunan desa.

Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan adanya benang merah bahwa pemberdayaan perempuan yang berbasis pada potensi lokal dan kearifan budaya mampu meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, sekaligus melestarikan tradisi masyarakat. Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pengembangan produk lokal, baik berupa pangan maupun hasil pertanian, serta penguatan usaha ekonomi kreatif. Di sisi lain, penelitian ini menghadirkan kebaruan karena berfokus pada implementasi Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya yang tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai sosial, budaya dan politik dalam kurikulum pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam aspek pemberdayaan ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran kritis, kepemimpinan, serta peran perempuan dalam melestarikan budaya dan memperkuat pembangunan masyarakat di tingkat provinsi.

Tabel 2.1 Penulisan Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
Qosidah	<i>Pemberdayaan Perempuan Melalui Potensi Lokal Parijoto di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara (2022)</i>	Penelitian kualitatif dengan studi lapangan	Pemanfaatan tanaman Parijoto melalui pembentukan kelompok tani perempuan berhasil meningkatkan keterampilan, membentuk usaha bersama, serta mendukung peningkatan pendapatan keluarga.
Lutfiyah	<i>Pemberdayaan Perempuan Berbasis Potensi Lokal dalam Program Desa Vokasi (2023)</i>	Penelitian deskriptif kualitatif dengan wawancara dan observasi	Program Desa Vokasi meningkatkan kapasitas perempuan dalam kelompok usaha, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat kemandirian ekonomi keluarga dan pembangunan desa.
Nazirah, Nilahayati, Humaira, Ramadhani, Lubis, & Wirda	<i>Pelatihan Kemandirian Pangan Perempuan di Desa Dayah Aron melalui Olahan Teukeurabe Berbasis Kearifan Lokal (2025)</i>	Pendekatan partisipatif melalui pelatihan dan pendampingan	Pelatihan berbasis kearifan lokal meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan antusiasme perempuan dalam mengembangkan produk lokal. Produk bahkan dapat dipasarkan secara daring, sehingga memberi dampak ekonomi positif dan menjaga tradisi.

2.6 Kerangka Berpikir

Implementasi kebijakan pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pencapaiannya. Dalam konteks penelitian ini, Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga

Berencana Provinsi Sumatera Utara, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta peran perempuan dalam pembangunan berbasis budaya lokal.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, terdapat sejumlah faktor penyebab atau penghambat implementasi program, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya baik dari aspek anggaran, tenaga pendamping, maupun sarana dan prasarana pelatihan.
2. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat, di mana sebagian perempuan belum sepenuhnya terlibat karena keterbatasan waktu, motivasi, dan dukungan keluarga.
3. Koordinasi antarinstansi yang belum optimal, sehingga program sering berjalan parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan program pembangunan lainnya.
4. Kendala budaya dan *mindset* tradisional, di mana masih ada anggapan bahwa peran perempuan sebatas domestik sehingga memengaruhi tingkat partisipasi.

Untuk menganalisis implementasi program ini, penelitian menggunakan Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu:

1. Standar dan tujuan kebijakan (sejauh mana program memiliki kejelasan arah, target, dan indikator keberhasilan).
2. Sumber daya (dukungan dana, tenaga pelaksana, fasilitas, dan waktu yang tersedia).
3. Komunikasi antarorganisasi (koordinasi antar lembaga pemerintah, mitra, dan masyarakat).

4. Karakteristik organisasi pelaksana (struktur birokrasi, kapasitas kelembagaan, serta komitmen aparatur).
5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik (dukungan lingkungan eksternal seperti budaya, partisipasi masyarakat, dan kebijakan daerah).
6. Disposisi implementor (sikap, komitmen, serta keseriusan pelaksana program di lapangan).

Dengan mengaitkan kondisi di lapangan dengan teori Van Meter dan Van Horn, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana implementasi Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya dijalankan, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat, serta strategi yang dapat dilakukan agar tujuan program tercapai.

Menghindari bias makna dalam penulisan, maka penulisan ini harus memiliki arah yang menjadi fokus dari penulisan ini. Berdasarkan uraian diatas maka model kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2.2 Kerangka Berpikir

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975)

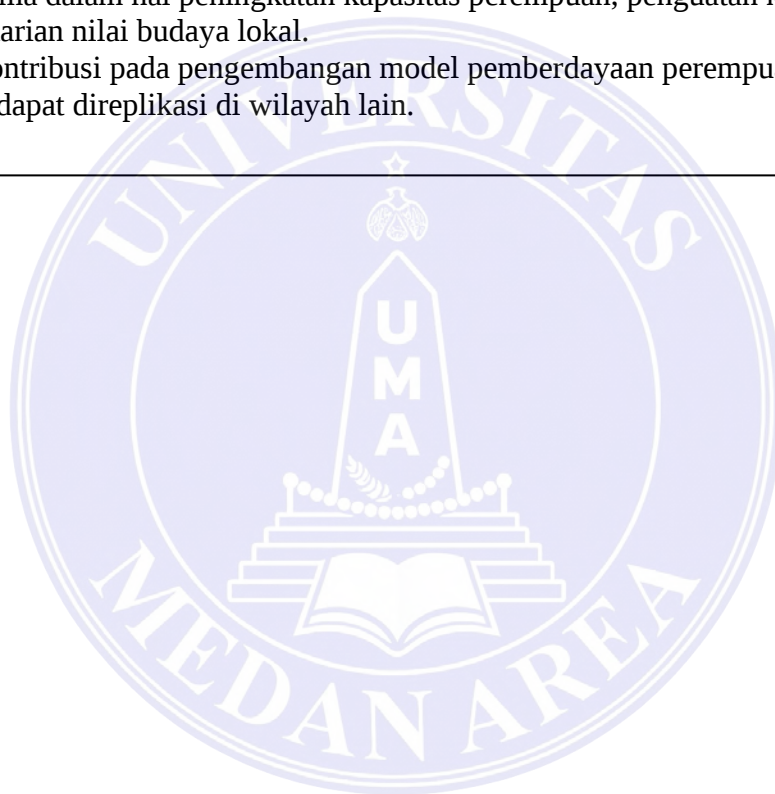
1. Standar dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi Antarorganisasi
4. Karakteristik organisasi pelaksana
5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik
6. Disposisi Pelaksana

Faktor Penyebab

1. Keterbatasan sumber daya
2. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat
3. Koordinasi antarinstansi yang belum optimal
4. Kendala budaya dan mindset tradisional

**Hasil yang diharapkan**

1. Menghasilkan gambaran komprehensif tentang implementasi Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, baik dari aspek internal maupun eksternal.
3. Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas program, terutama dalam hal peningkatan kapasitas perempuan, penguatan kelembagaan, serta pelestarian nilai budaya lokal.
4. Berkontribusi pada pengembangan model pemberdayaan perempuan berbasis budaya yang dapat direplikasi di wilayah lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif agar peneliti lebih fokus dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan secara sistematis, logis, objektif dan benar-benar terjadi, agar dapat dipahami setiap fakta yang terjadi guna mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang terjadi. Menurut Sugiyono (2014:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di sekolah dengan tenaga pendidik dan kependidikan, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain". Berdasarkan data tersebut, tentunya data yang diperoleh haruslah sesuai dengan fakta sehingga dapat menjadi referensi yang akan menimbulkan beberapa klasifikasi data.

Sugiyono (2014:62) mengemukakan bahwa, "setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen". Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Iskandar Muda No.272 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober s/d Desember 2025.

3.3 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penulisannya. Menurut Bagong Suyatno (2010:172) informan penulisan meliputi beberapa macam, yaitu:

- a) informan kunci merupakan orang-orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penulisan,
- b) informan utama merupakan orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti,
- c) informan tambahan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penulisan ini yang akan menjadi informan penulisan adalah para pegawai yang berkaitan dengan implementasi program Kelas Perempuan Mandiri berbudaya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dan beberapa orang luar sebagai penerima layanan yaitu diantaranya :

1. Informasi Kunci : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara

2. Informasi Utama : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara
3. Informasi Tambahan : Peserta Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penulisan ilmiah karena data yang dihasilkan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Alat pengumpul data berfungsi untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan yang diperlukan dalam kegiatan penulisan. Dalam penulisan kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak menggunakan observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman dalam Hardani dkk (2020:122), menyatakan bahwa: *the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review.*

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini ada tiga, yaitu antara lain :

a. Wawancara (*interview*)

Menurut buku metode Penulisan Kualitatif Sugiyono (2012:137) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data wawancara adalah percakapan atau Tanya jawab langsung kepada masyarakat yang diarahkan dengan tujuan tertentu. Teknik yang digunakan adalah metode *Interview*,

dimana penulisan mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian langsung dijawab langsung oleh masyarakat tersebut. Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara penulis dengan sumber data (informan). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam penulisan ini wawancara dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara “*face to face*” artinya penulis berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penulisan dan penulis mencatat jawaban dari informan.

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepht interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada pedoman wawancara (*interview guidances*) yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian yaitu kepala dinas, kepala bidang pengarusutamaan gender, dan para pejabat fungsional maupun staf. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin tentang implementasi program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya.

b. Observasi (pengamatan)

Pengumpulan data untuk menjawab masalah penulisan dengan cara melakukan pengamatan yakni mengamati gejala yang diteliti secara langsung. Teknik pengamatan ini memungkinkan penulis melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Riyanto dalam Hardani dkk (2020:125), menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap

objek penulisan. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Implementasi program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara.

Observasi dilakukan oleh penulis secara partisipatif, artinya penulis hadir di lokasi sebagai pengamat yang tidak terlibat secara langsung dalam pelayanan, tetapi cukup dekat untuk melihat proses secara nyata.

Observasi dilaksanakan untuk melengkapi data dari wawancara dan dokumentasi, serta untuk memastikan validitas data melalui *cross-check* antara apa yang dikatakan oleh informan dan apa yang terjadi di lapangan.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara, observasi, informasi juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Yaitu, surat-surat, catatan harian, cendra mata, laporan, photo-photo serta video dokumentasi kegiatan. Sugiyono dalam Hardani dkk (2020:150), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penulisan kualitatif.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen tertulis, arsip, dan bukti visual yang relevan dengan objek penulisan. Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara

mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya untuk mendapatkan data kegiatan kantor, foto-foto kegiatan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya diinterpretasikan secara deskriptif kualitatif untuk mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan peran kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Adapun 4 (empat) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya

2. Reduksi Data

Reduksi Data (*Data Reduction*) data dilapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting

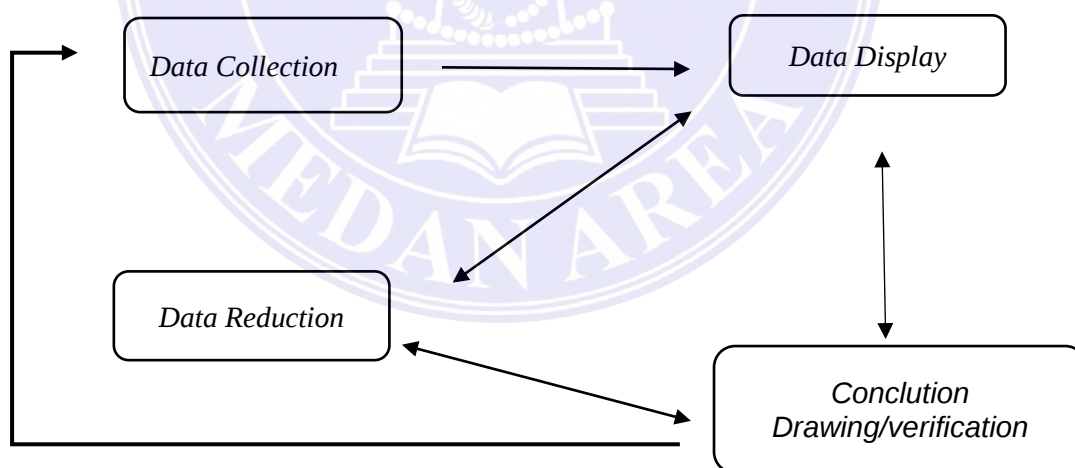
kemudian dicari tema atau polanya.

3. Penyajian Data

Penyajian Data (*Data Display*) dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif..

4. Menarik Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data
Sumber: Sugiyono (2010:431)

3.6 Definisi Konsep dan Operasional

3.6.1 Definisi Konsep

Dalam penelitian ini, implementasi program dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh organisasi pelaksana kebijakan untuk menerjemahkan keputusan politik kedalam tindakan nyata yang memberikan dampak pada masyarakat. Implementasi tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan teknis, tetapi juga mencakup proses komunikasi, koordinasi, serta komitmen dari para pelaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta disposisi implementor.

Sementara itu, Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya adalah sebuah program yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan peran perempuan dalam pembangunan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan dan ekonomi perempuan, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya sebagai identitas daerah.

Dengan demikian, secara konseptual penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi kebijakan dalam bentuk Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya dijalankan oleh pemerintah daerah, faktor apa yang mendukung dan menghambat, serta sejauh mana tujuan program tercapai.

3.6.2 Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan secara rinci bagaimana konsep-konsep dalam penelitian diukur atau diamati secara empiris. Penjelasan ini berfokus pada narasi yang mendalam untuk menggambarkan variabel-variabel penelitian, indikator pengukuran, dan metode pengumpulan data, sehingga memungkinkan analisis yang sistematis dan terukur. Agar konsep penelitian dapat diukur secara lebih jelas, maka dibuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Dioperasionalkan melalui kejelasan visi, misi, dan sasaran program, serta indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara.

2. Sumber Daya

Dioperasionalkan dengan melihat ketersediaan dana, tenaga pelaksana, sarana prasarana, serta alokasi waktu yang digunakan dalam pelaksanaan program.

3. Komunikasi Antarorganisasi

Dioperasionalkan melalui mekanisme koordinasi, sosialisasi, serta pola komunikasi antara Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, mitra lembaga lain, dan kelompok perempuan peserta program.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dioperasionalkan dengan mengamati struktur birokrasi, kapasitas kelembagaan, serta komitmen aparatur dalam mengawal jalannya program.

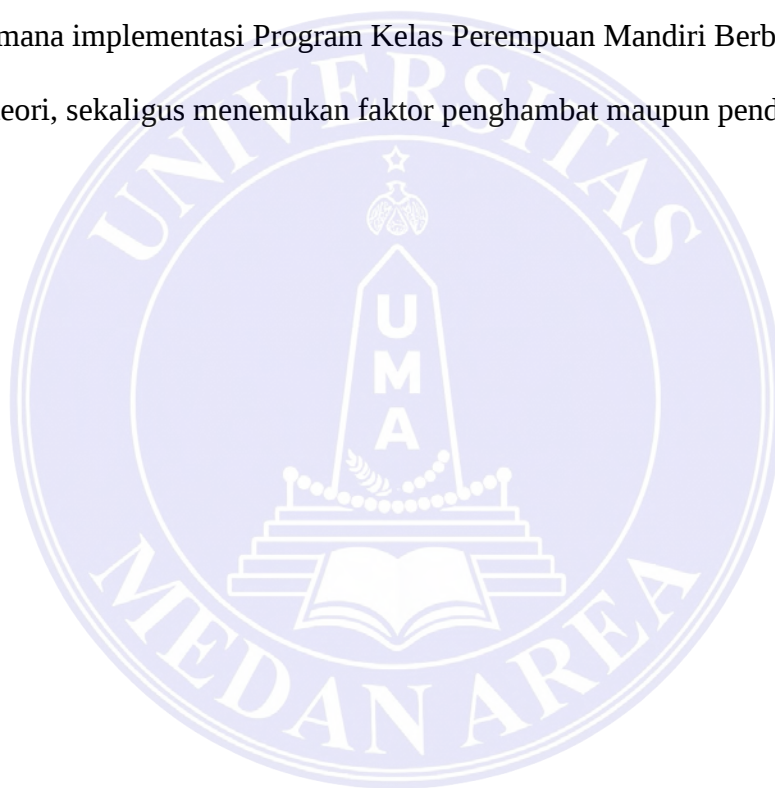
5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dioperasionalkan dengan memperhatikan dukungan lingkungan eksternal, tingkat partisipasi masyarakat, norma budaya, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah.

6. Disposisi Implementor

Dioperasionalkan melalui sikap, motivasi, komitmen, dan keseriusan pelaksana program dalam menjalankan kegiatan di lapangan.

Dengan definisi operasional ini, penelitian dapat lebih terarah untuk menilai sejauh mana implementasi Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya berjalan sesuai teori, sekaligus menemukan faktor penghambat maupun pendukungnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program

Pelaksanaan program secara umum telah berjalan baik namun belum optimal. Program mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian ekonomi, dan pelestarian budaya perempuan, meskipun masih terdapat ketimpangan antar daerah. Standar dan tujuan kebijakan sudah jelas dan dipahami, namun keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi, perbedaan kapasitas kelembagaan, kondisi sosial budaya, serta variasi komitmen pelaksana memengaruhi efektivitas implementasi. Secara keseluruhan, program tergolong berhasil, tetapi masih memerlukan penguatan agar lebih merata dan berkelanjutan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung meliputi kejelasan tujuan kebijakan, komitmen pelaksana, dukungan masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, koordinasi yang belum optimal, ketimpangan kapasitas antar daerah, budaya patriarkal, serta lemahnya monitoring dan evaluasi.

Secara umum, keberhasilan implementasi program dipengaruhi oleh kesiapan internal organisasi dan dukungan eksternal, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran yang bersifat aplikatif sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas aparatur dan fasilitator melalui pelatihan teknis dalam pemberdayaan perempuan berbasis budaya.
2. Dukungan anggaran dan sarana prasarana perlu diperkuat agar program dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata.
3. Koordinasi dan komunikasi antar DP3AKB Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu dioptimalkan agar pelaksanaan lebih sinkron dan terukur.
4. Program perlu disesuaikan dengan nilai budaya lokal melalui pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi setempat.
5. Monitoring dan evaluasi harus diperkuat secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas program.
6. Kerja sama dengan berbagai pihak perlu diperluas guna mendukung pelatihan, permodalan, dan pemasaran hasil kegiatan.

Dengan upaya tersebut, program diharapkan menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memperkuat peran perempuan dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S., & Jabar, C. S. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bagong, S. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Birkland, T. (2001). *Public Policy: Process and Implementation*. New York: Macmillan.
- Dunn, W. N. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. C. (1984). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Gaffar, A. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goggin, M. L., Bowman, A. O., Lester, J. P., & O'Toole, L. J. (1990). *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. HarperCollins.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Guntur, S. (2004). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Heineman, R., dkk. (1997). *The World of the Policy Analyst: Rationality, Values, and Politics*. Chatham: Chatham House.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Moser, C. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. London: Routledge.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Narwoko, J., & Yuryanto, B. (2004). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurdin, U. (2002). *Konsep Implementasi dalam Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ripley, R., & Franklin, G. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- Salusu, J. (2021). *Kebijakan Publik: Teori dan Implementasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suherman, A., & Sukjaya, Y. (1990). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tayibnapi, F. Y. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.

Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Wahab, S. A. (1991). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, S. A. (2016). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.

Wibawa, S., dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Lutfiyah. (2023). Pemberdayaan Perempuan Berbasis Potensi Lokal dalam Program Desa Vokasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 112–125.

Nazirah, Nilahayati, Humaira, Ramadhani, Lubis, & Wirda. (2025). Pelatihan Kemandirian Pangan Perempuan di Desa Dayah Aron melalui Olahan Teukeurabe Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, 4(1), 55–70.

Qosidah. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Potensi Lokal Parijoto di

Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(3), 88–99.

Siregar, L. (2021). Kendala Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah.” *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 3(1), 45–60.

Siregar, N. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 9(2), 155–166.
<https://doi.org/10.31289/jipsp.v9i2.4231>

Simanjuntak, R. (2022). Hambatan Komunikasi Lintas Lembaga dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak di Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 45–58. <https://doi.org/10.31227/osf.io/9vxy3>

UN Women. (2015). *Progress of the World's Women 2015–2016: Transforming Economies, Realizing Rights*. New York: UN Women.

Regulasi dan Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Indeks Pembangunan Gender Sumatera Utara*. Medan: BPS Sumut.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia*. Jakarta: BPS.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

LAMPIRAN



Gambar 1. Pendampingan masyarakat di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang sebagai Lokasi Percontohan Implementasi Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya



Koordinasi dengan Kadis DP3AKB dan Ka. UPTD PPA terkait peran Organisasi dalam mendukung Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya



Kecamatan Air Batu, Indonesia



Koordinasi dengan Dinas Pengampu Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Aparat Desa di Kabupaten/Kota terkait Program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya